



## Dari Ketimpangan menuju Kesetaraan: Pendekatan *Smart Power* untuk Penyelesaian Konflik di Papua

Andar Dodianto Panggabean<sup>1)</sup>, Mitro Prihartono<sup>2)</sup>, Dudik Purwanto<sup>3)</sup>

Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Indonesia<sup>1)</sup>  
Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia<sup>2)</sup>  
Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Indonesia<sup>3)</sup>

Korespondensi author: [andar.panggabean@gmail.com](mailto:andar.panggabean@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi *Smart Power* sebagai solusi komprehensif dalam penyelesaian konflik di Papua. Melalui metodologi kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ketimpangan ekonomi dan marginalisasi sosial telah menjadi akar utama konflik berkepanjangan di Papua, yang diperparah oleh kekerasan bersenjata dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pendekatan *Smart Power*, yang mengombinasikan kekuatan keras dan lunak, diusulkan sebagai solusi utama. Dialog dan negosiasi menjadi komponen penting dalam membangun kepercayaan dan meredakan ketegangan, sementara pembangunan berkelanjutan yang inklusif diidentifikasi sebagai sarana untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, penguatan otonomi khusus dipandang sebagai elemen kunci untuk memperluas partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan holistik melalui kombinasi strategi keamanan, dialog, dan pembangunan berkelanjutan mampu membuka jalan menuju penyelesaian konflik yang damai dan berkelanjutan, sekaligus mendorong terciptanya kesetaraan yang lebih inklusif di Papua.

**Kata kunci:** Papua, Penyelesaian Konflik, *Smart Power*

### Abstract

*This research aims to analyze the Smart Power strategy as a comprehensive solution in conflict resolution in Papua. Through a descriptive qualitative methodology, this study explores how economic inequality and social marginalization have been the main root of prolonged conflict in Papua, which is exacerbated by armed violence and low public trust in the government. The Smart Power approach, which combines hard and soft forces, is proposed as the main solution. Dialogue and negotiation are important components in building trust and easing tensions, while inclusive sustainable development is identified as a means to address inequality and improve the well-being of Papuans. In addition, strengthening special autonomy is seen as a key element to expand local community participation in resource management and regional policies. This study concludes that a holistic approach through a combination of security strategies, dialogue, and sustainable development can pave the way to peaceful and sustainable conflict resolution, while encouraging the creation of more inclusive equality in Papua.*

**Keyword:** Conflict Resolution, Papua, *Smart Power*

## PENDAHULUAN

Papua, sebagai wilayah paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), resmi menjadi bagian Indonesia melalui Resolusi PBB No. 2504 pada 19 November 1969, di mana dalam resolusi tersebut menegaskan integrasi Papua ke dalam Indonesia, yang juga memberikan legitimasi hukum internasional terhadap proses tersebut. Papua kemudian ditetapkan sebagai daerah otonomi di bawah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Provinsi Irian Barat. Meskipun demikian, dinamika politik dan sosial di Papua terus berkembang, dengan munculnya rasa nasionalisme yang kuat di kalangan masyarakat asli Papua. Nasionalisme ini seringkali diwujudkan dalam bentuk resistensi terhadap pihak luar, terutama setelah integrasi dengan Indonesia.

Menurut Natalie Pigay (2001) dalam (Cahya et al., 2023), sejarah konflik Papua pada dasarnya dapat dilihat melalui tiga fase utama. Pertama, konflik antara masyarakat asli Papua dan penjajah Belanda yang berlangsung sejak 1828 hingga 1962. Periode ini ditandai sebagai fase kolonisasi dan eksploitasi sumber daya Papua oleh Belanda. Kedua, konflik antara Indonesia dan Belanda dari 1946 hingga 1962 yang terjadi seiring dengan upaya Indonesia untuk merebut Papua dari kontrol kolonial Belanda. Ketiga, konflik antara masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia yang dimulai sejak 1962 dan masih berlangsung hingga sekarang. Konflik ini sering kali dipicu oleh perbedaan pandangan terkait kedaulatan, identitas, serta perlakuan pemerintah pusat terhadap Papua.

Sejarah panjang konflik Papua yang dimulai sejak masa kolonial hingga hubungan yang kompleks dengan pemerintah Indonesia turut memperparah kondisi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Ketegangan yang muncul akibat perbedaan pandangan terkait kedaulatan dan identitas Papua semakin diperburuk oleh ketidakadilan dalam distribusi hasil pembangunan ekonomi. Meskipun Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya ini lebih banyak dinikmati oleh pusat, sementara masyarakat Papua terus merasakan ketimpangan yang semakin melembaga. Faktor-faktor ini, ditambah dengan korupsi di tingkat lokal dan pusat, menciptakan dinamika yang memperparah kesenjangan dan memperkuat rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua (Kartika & Hamid, 2020).

Ketidakpuasan ini semakin diperparah oleh kondisi geografis dan demografis yang kompleks, yang menjadikan pembangunan di wilayah tersebut lebih sulit dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Papua, dengan luas wilayah 421.981 km<sup>2</sup> (sekitar 3,5 kali luas Pulau Jawa) dan topografi yang meliputi pegunungan serta rawa-rawa di wilayah pesisir, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Papua menjadi lebih sulit. Sebagian besar penduduk Papua, sekitar 70%, tinggal di daerah pedesaan dan pelosok pegunungan, yang mengakibatkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya. Keadaan ini semakin diperburuk dengan jumlah penduduk asli Papua yang berjumlah sekitar 66% dari total populasi, yang tersebar di tujuh zona budaya atau adat utama: Saireri, Doberai, Bomberai, Ha-Anim, Tabi, Lano-Pago, dan Me-Pago. Dengan lebih dari 250 kelompok etnis, Papua merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama, namun perbedaan ini sering kali menjadi sumber konflik sosial.

Keberagaman budaya yang ada di Papua, meskipun menjadi kekayaan, sering kali juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan sosial di wilayah tersebut. Dengan 66% penduduk asli yang tersebar di tujuh zona adat utama, serta lebih dari 250 kelompok etnis, perbedaan nilai dan norma menjadi potensi konflik yang tak terhindarkan. Di samping itu, masuknya etnis non-Papua semakin memperumit dinamika sosial dan budaya yang sudah ada. Ketidaktepahaman dan minimnya komunikasi antar kelompok etnis baik dari sisi adat maupun sosial kerap kali memicu kekerasan dan ketegangan, yang mengarah pada konflik sosial yang lebih dalam (Kartika & Hamid, 2020).

Kasus kekerasan bersenjata di Papua terus menjadi tantangan serius bagi stabilitas wilayah dan keamanan nasional. Salah satu insiden terbaru terjadi di Kabupaten Puncak, di mana terjadi baku tembak antara pasukan Polri-TNI dan kelompok bersenjata yang mengakibatkan

jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil. Konflik ini memperpanjang daftar kekerasan yang melibatkan kelompok bersenjata di Papua, yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Terlepas dari upaya pemerintah dalam meredam eskalasi melalui operasi keamanan, kekerasan bersenjata masih menjadi kenyataan yang memprihatinkan, memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Tidak hanya bentrokan langsung, tetapi juga laporan penyiksaan terhadap warga sipil oleh aparat keamanan, seperti kasus di Puncak, Papua, menunjukkan bahwa pendekatan kekerasan bukanlah solusi yang komprehensif.

Meskipun jumlah insiden kekerasan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) menurun pada tahun 2022, peningkatan jumlah korban jiwa menunjukkan eskalasi dalam intensitas konflik. Serangan kelompok bersenjata yang mengklaim sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Nduga, yang menargetkan pekerja konstruksi, menegaskan bahwa kelompok tersebut berupaya merusak proyek pembangunan infrastruktur di Papua sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran pemerintah Indonesia di wilayah tersebut. Selain serangan fisik, penyanderaan juga menjadi strategi yang digunakan OPM, seperti insiden pada Februari 2023 ketika seorang pilot asal Selandia Baru disandera di Kabupaten Nduga. Penyanderaan ini merupakan protes terhadap pemerintah Indonesia, dan menambah dimensi internasional pada konflik bersenjata di Papua (BBC, 2023).

Upaya pemerintah Indonesia untuk menangani kekerasan ini melalui operasi militer seringkali menghasilkan bentrokan antara pasukan keamanan dan kelompok bersenjata. Meskipun operasi-operasi ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, bentrokan yang terjadi kerap menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak, termasuk warga sipil yang tidak bersenjata. Hal ini menunjukkan bahwa operasi militer bukan tanpa risiko bagi penduduk lokal, yang seringkali terjebak di antara kedua belah pihak dalam konflik ini. Akibatnya, ribuan warga sipil terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka, menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Papua. Pengungsi-pengungsi ini hidup dalam kondisi memprihatinkan di kamp-kamp pengungsian, menghadapi kekurangan akses terhadap layanan dasar seperti pangan, air bersih, dan perawatan kesehatan. Kekerasan yang terus berlanjut juga memperdalam trauma sosial dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga perdamaian di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, kasus kekerasan bersenjata di Papua tidak hanya merupakan konflik fisik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata, tetapi juga menyentuh isu-isu struktural yang lebih dalam, termasuk ketidaksetaraan, marginalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui kekuatan militer, tetapi membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh yang mencakup dialog, pembangunan yang adil, dan perlindungan hak-hak masyarakat Papua. Hanya dengan demikian, harapan untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua dapat tercapai.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif-eksplanatif dengan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan detail terkait masalah penelitian yang diangkat. Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Moleong (2013), berupaya menafsirkan berbagai peristiwa yang terjadi dalam konteks lingkungan alami melalui partisipasi langsung dari subjek penelitian. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan peristiwa secara rinci, sebagaimana diungkapkan oleh Sugiyono (2010), dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Ketimpangan

Ketimpangan menyiratkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan miskin, yang sering kali menjadi pemicu ketidakstabilan sosial. Baldwin (1986) menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan mencerminkan perbedaan dalam

kemakmuran ekonomi yang terlihat melalui ketimpangan pendapatan. Fenomena ini diperburuk di negara berkembang seperti Indonesia, di mana dampak balik yang kuat dan dampak sebar yang lemah menciptakan jurang ekonomi yang semakin dalam, sebagaimana diungkapkan oleh Jhingan (1999). Ketimpangan ini juga mencakup disparitas antar wilayah, yang umum terjadi akibat perbedaan dalam kandungan sumber daya alam, kondisi demografi, serta kemampuan daerah dalam mendorong pembangunan (Sjafrizal, 2012). Hal ini menciptakan konsep daerah maju dan daerah terbelakang, yang mencerminkan ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan.

Di Papua, ketimpangan ini menjadi salah satu akar konflik yang berkepanjangan. Papua, meskipun kaya akan sumber daya alam, sering kali tidak merasakan manfaat dari pembangunan yang merata. Kuncoro (2006) menyatakan bahwa kesenjangan antar wilayah terjadi karena perbedaan dalam faktor produksi dan ketersediaan sumber daya. Papua yang berada di wilayah terpencil dengan akses yang terbatas terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, seringkali tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia yang lebih berkembang. Ketimpangan ini menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat Papua, yang merasa diabaikan oleh pemerintah pusat.

Lebih jauh lagi, Simon Kuznets (1955) dalam kurva Kuznets "U-terbalik" menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, namun akan membaik seiring dengan pemerataan pendapatan di tahap selanjutnya. Namun, di Papua, proses ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alih-alih mencapai pemerataan, pembangunan ekonomi yang lambat dan kurangnya akses terhadap sumber daya justru memperburuk kesenjangan ekonomi. Situasi ini berkontribusi pada konflik sosial dan politik yang berakar pada ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap kebijakan pembangunan dan alokasi sumber daya yang dirasakan tidak adil.

### Konsep Marginalisasi

Konsep marginalisasi merupakan istilah yang mengacu pada kondisi di mana kelompok tertentu dalam masyarakat mengalami penyingkiran, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Kelompok yang termarginalkan sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, layanan publik, atau kesempatan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya memperparah kondisi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Marginalisasi tidak hanya membuat kelompok-kelompok ini berada pada posisi yang tidak berdaya, tetapi juga mengakibatkan mereka terisolasi dari kehidupan sosial arus utama, sehingga sering kali menjadi sumber konflik yang berlarut-larut. Dalam konteks Papua, marginalisasi menjadi salah satu akar konflik bersenjata yang terus berlangsung. Ketidakadilan distribusi sumber daya, akses terbatas terhadap layanan publik, serta perasaan terpinggirkan dalam struktur politik dan ekonomi nasional menciptakan ketegangan yang mendalam di wilayah tersebut.

Marginalisasi di Papua dapat dilihat dalam berbagai aspek, salah satunya adalah ketidaksetaraan pembangunan antara wilayah Papua dan daerah-daerah lain di Indonesia. Meskipun kaya akan sumber daya alam, sebagian besar masyarakat asli Papua hidup dalam kondisi kemiskinan, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Keadaan ini semakin diperparah oleh perasaan terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan politik di tingkat nasional, di mana kebijakan yang mempengaruhi masyarakat Papua sering kali tidak melibatkan partisipasi aktif mereka. Akibatnya, masyarakat Papua merasa diabaikan dan tidak diakui sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, yang memicu resistensi terhadap pemerintah pusat dan memperkuat narasi separatisme.

Lebih jauh, marginalisasi sosial di Papua juga terkait dengan identitas budaya dan etnis. Masyarakat asli Papua sering kali merasa terpinggirkan oleh masuknya kelompok pendatang yang mendominasi ekonomi dan struktur sosial di wilayah mereka. Ketidakseimbangan ini menciptakan perasaan ketidakadilan yang mendalam, di mana masyarakat asli Papua merasa kehilangan kontrol atas tanah dan sumber daya alam mereka. Konflik antara masyarakat asli dan pendatang ini memperburuk situasi, memicu ketegangan sosial yang sering kali berujung pada

kekerasan dan konflik bersenjata. Dalam hal ini, marginalisasi tidak hanya terjadi dalam bentuk material, tetapi juga dalam bentuk simbolis, di mana identitas dan hak-hak budaya masyarakat Papua tidak diakui secara penuh.

Konflik bersenjata di Papua, dengan demikian, tidak bisa dipisahkan dari proses marginalisasi yang telah berlangsung lama. Perasaan ketidakadilan dan penyingkiran ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mengakomodasi identitas dan aspirasi politik masyarakat Papua

### **Smart Power oleh Joseph Nye**

Teori *Smart Power*, yang diperkenalkan oleh Joseph Nye, menekankan pentingnya menggabungkan kekuatan keras (*Hard Power*) dan kekuatan lunak (*Soft Power*) secara strategis untuk mencapai tujuan nasional. Dalam konteks penyelesaian konflik bersenjata di Papua, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih komprehensif dibandingkan penggunaan kekuatan militer atau diplomasi semata. *Smart Power* mengintegrasikan tekanan militer yang diperlukan untuk mengatasi kelompok bersenjata, dengan kebijakan pembangunan sosial-ekonomi dan penguatan hubungan antaretnis untuk meredam akar konflik yang disebabkan oleh ketimpangan dan marginalisasi.

Dalam konflik Papua, ketimpangan ekonomi dan marginalisasi sosial menjadi sumber ketidakpuasan yang berkelanjutan. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedalaman, serta ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi, mendorong sentimen anti-pemerintah di antara masyarakat Papua. Di sinilah *Smart Power* memainkan peran krusial. Kekuatan lunak yang mencakup program-program pembangunan, pendidikan, dan peningkatan akses kesehatan dapat meredakan ketegangan dengan mendorong integrasi masyarakat lokal ke dalam arus pembangunan nasional. Sementara itu, kekuatan keras dalam bentuk operasi militer terukur dan penegakan hukum diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah yang terdampak oleh kekerasan bersenjata.

Lebih jauh, strategi *Smart Power* dapat digunakan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat Papua. Penerapan kebijakan yang menghargai pluralitas budaya dan memberikan ruang bagi partisipasi politik serta otonomi daerah yang lebih besar merupakan bentuk *Soft Power* yang esensial dalam meredakan tuntutan separatisme. Kombinasi ini memungkinkan negara tidak hanya mempertahankan kedaulatannya melalui kekuatan militer, tetapi juga memperkuat legitimasi politiknya melalui daya tarik nilai-nilai dan kebijakan yang inklusif.

Seperti halnya analogi "*Pisau Swiss Army*" yang sering digunakan dalam studi keamanan, *Smart Power* juga mampu menyelesaikan berbagai masalah di berbagai level (Chong, 2015). Kekuatan militer dalam konflik Papua, misalnya, diperlukan untuk menjaga keamanan fisik dan melawan kelompok bersenjata yang menentang pemerintah. Namun, ini tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah konflik yang berakar pada ketimpangan ekonomi, marginalisasi, dan kurangnya integrasi sosial. Dalam hal ini, kekuatan lunak memainkan peran penting, seperti memperkuat hubungan diplomasi dengan pemimpin lokal, meningkatkan program pendidikan, serta memajukan pembangunan ekonomi yang inklusif. Kombinasi ini memungkinkan solusi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, daripada sekadar penekanan pada pendekatan militer.

Lebih lanjut, dalam konteks Papua, *Smart Power* dapat membantu mengurangi ketergantungan pada kekuatan keras yang sering kali memperburuk persepsi publik tentang pemerintah pusat sebagai otoritas represif. Pendekatan *Soft Power*, seperti mempromosikan dialog inklusif dan menghargai identitas budaya Papua, akan menciptakan ruang untuk negosiasi yang lebih produktif. Gallarotti menggarisbawahi bahwa kombinasi kekuatan keras dan lunak tidak harus dilihat sebagai oposisi, melainkan sebagai alat yang saling melengkapi (Gallarotti et al., 2011). Dalam penyelesaian konflik Papua, penggunaan *Smart Power* tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga membuka jalan untuk mencapai perdamaian melalui cara-cara yang lebih manusiawi, tanpa sepenuhnya bergantung pada kekuatan militer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Permasalahan Kemiskinan di Papua

Kemiskinan di Papua telah menjadi salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang paling menonjol di Indonesia. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023 menunjukkan bahwa provinsi Papua masih memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan 26,8% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Papua Barat mengikuti dengan angka kemiskinan sebesar 21,4%. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 9,57%. Permasalahan kemiskinan di Papua tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Tingginya angka kemiskinan di Papua menggambarkan kesenjangan yang signifikan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan provinsi seperti DKI Jakarta yang hanya memiliki tingkat kemiskinan sebesar 3,5% (Badan Pusat Statistik, 2023).

Tingkat kemiskinan yang tinggi di Papua sering kali dikaitkan dengan marginalisasi ekonomi dan sosial yang dialami oleh masyarakat asli Papua. Selama beberapa dekade, masyarakat asli Papua terpinggirkan dari sektor-sektor ekonomi yang berkembang pesat seperti pertambangan dan perkebunan. Sektor-sektor ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang sering kali tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal (Kartika & Hamid, 2020). Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik juga memperburuk kondisi kemiskinan. Kemiskinan struktural terjadi karena masyarakat asli tidak memiliki akses yang cukup terhadap modal, teknologi, dan peluang pasar, yang semuanya menjadi penghalang bagi mereka untuk keluar dari jeratan kemiskinan.

Kondisi geografis Papua yang terisolasi dan sulit dijangkau juga menjadi faktor penting dalam memperparah kemiskinan di wilayah ini. Keterbatasan infrastruktur jalan, transportasi, dan layanan publik menyebabkan biaya hidup di Papua menjadi sangat tinggi, terutama di daerah pedalaman. Harga barang-barang kebutuhan pokok di daerah terpencil bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dibandingkan harga di daerah lain di Indonesia. Hal ini memperburuk daya beli masyarakat dan mempersempit akses mereka terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Sejak masa Orde Baru, upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di Papua melalui pembangunan ekonomi sering kali tidak memperhatikan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan, cenderung mengabaikan sektor-sektor yang lebih langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat lokal, seperti pertanian dan perikanan. Akibatnya, meskipun Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sebagian besar penduduknya tetap hidup dalam kemiskinan. Ketimpangan distribusi kekayaan ini menjadi salah satu akar masalah yang memicu ketidakpuasan dan konflik sosial di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan di Papua melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan otonomi khusus. Namun, hasilnya masih belum optimal. Program-program yang diluncurkan sering kali tidak diimplementasikan secara efektif dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Keberadaan PT Freeport sebagai salah satu perusahaan terbesar di wilayah tersebut tidak serta-merta mengatasi ketimpangan ekonomi, karena mayoritas tenaga kerja di perusahaan tersebut masih didominasi oleh non-Papua, sementara masyarakat lokal hanya memperoleh sedikit manfaat langsung. Data menunjukkan bahwa hanya 41,2% pekerja di PT Freeport yang merupakan warga Papua, sementara mayoritas posisi tenaga kerja masih didominasi oleh non-Papua (Hidayatulloh et al., 2022). Meskipun PT Freeport menyediakan berbagai program kesejahteraan seperti Jaminan Kesehatan Nasional dan *Program Saving Plan*, manfaat langsung yang diterima masyarakat Papua secara umum tidak cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan struktural yang mereka hadapi.

Selain ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja, ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertambangan juga menciptakan masalah jangka panjang bagi masyarakat lokal. Kontribusi keuangan PT Freeport terhadap Produk Domestik Bruto Nasional melalui pajak, royalti, dan dividen, serta kontribusi tidak langsung seperti pengembangan masyarakat, pada kenyataannya, belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Papua. Investasi besar yang dilakukan oleh perusahaan, seperti US\$18 miliar untuk pembangunan bawah tanah, lebih banyak berfokus pada kepentingan operasional perusahaan dan pembangunan infrastruktur internal, bukan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini memperkuat persepsi bahwa meskipun Papua menjadi sumber daya alam yang sangat berharga bagi Indonesia, distribusi manfaat dari eksploitasi sumber daya ini belum merata.

Selain itu salah satu ciri utama penduduk asli Papua adalah ketergantungan pada sektor subsisten, terutama dalam bidang pertanian tradisional. Namun, karakter ini tidak selaras dengan struktur ekonomi modern yang ada di Papua. Sektor industri pertambangan yang padat modal, meskipun menyumbang 57% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hanya mampu menyerap 0,6% tenaga kerja. Sebaliknya, sektor pertanian, yang menyerap 75% angkatan kerja, hanya berkontribusi sebesar 19% terhadap PDRB (Hidayatulloh et al., 2022). Ketidakselarasan ini mencerminkan ketimpangan yang mendalam antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan kerja bagi penduduk asli Papua.

Selain itu, keberadaan PT Freeport Indonesia sering kali memicu ketegangan sosial antara pendatang dan masyarakat asli Papua. Kesenjangan ekonomi antara keduanya sering kali memperparah rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh warga Papua. Meskipun perusahaan telah menunjukkan komitmen terhadap pengembangan masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pemberdayaan lokal, dampaknya masih terbatas jika dibandingkan dengan skala permasalahan yang dihadapi Papua (PT Freeport Indonesia, 2018).

Ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi ini juga berakar pada diskriminasi sosial dan prasangka rasial. Masyarakat asli Papua sering kali diposisikan sebagai kelompok inferior, yang menyebabkan mereka terpinggirkan dalam struktur ekonomi dan politik. Kondisi ini telah terdokumentasi dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun 2001, yang menggambarkan rendahnya akses masyarakat Papua terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

Kemiskinan di Papua juga diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat asli Papua. Sebagian besar masyarakat asli Papua tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan formal, dengan 75% penduduk asli tidak memiliki akses pendidikan yang layak. Lebih dari 50% masyarakat asli tidak pernah mengenyam pendidikan formal atau tidak menyelesaikan sekolah dasar, sedangkan hanya 2% yang berhasil menamatkan pendidikan di perguruan tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan ini mempengaruhi kemampuan masyarakat Papua untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja modern dan mengakses peluang ekonomi yang lebih baik. Ketidakadilan ini juga tercermin dalam rendahnya keterwakilan masyarakat asli Papua dalam struktur birokrasi pemerintahan. Hanya 35% jabatan eselon II dan 26% jabatan eselon III di Pemerintah Provinsi Papua yang ditempati oleh masyarakat asli Papua, menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaruh yang terbatas dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka (Kartika & Hamid, 2020).

## **B. Ketidaksetaraan dan Marginalisasi di Papua**

Perkembangan ketidakadilan dan marginalisasi di Papua telah menjadi isu yang berlarut-larut selama beberapa dekade, dengan berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat asli Papua. Marginalisasi dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi menjadi salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Orang asli Papua seringkali dikesampingkan dari kebijakan-kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga mereka tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini diperburuk oleh diskriminasi rasial yang secara sistemik masih terjadi, yang pada gilirannya memperkuat ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat.

Selain itu, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan oleh aparat negara tetap menjadi isu serius yang belum mendapatkan penyelesaian yang adil. Impunitas terhadap pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan yang melibatkan aparat keamanan, memperdalam ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Masyarakat Papua merasa bahwa keadilan transisi di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya, mengingat belum adanya pengakuan atau pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran HAM yang terjadi. Kekerasan yang berulang kali terjadi di Papua memperburuk situasi ini, dan memperkuat keyakinan bahwa mereka terus mengalami ketidakadilan struktural.

Pemerintah pusat, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah mencoba menerapkan pendekatan non-keamanan melalui pembangunan infrastruktur dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, agenda percepatan pembangunan ini dinilai belum menyentuh aspek fundamental, yaitu penyelesaian masalah HAM di Papua. Meskipun ada upaya untuk membangun infrastruktur seperti jalan dan sekolah, hal ini dipandang oleh masyarakat Papua lebih sebagai upaya untuk memperkuat kontrol negara daripada untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagi banyak masyarakat Papua, pembangunan ini dikaitkan dengan upaya eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan kehadiran personel bersenjata di wilayah tersebut, yang hanya memperdalam rasa ketidakadilan dan marginalisasi yang telah lama mereka rasakan.

Adapun pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) serta penerapan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pada kenyataannya masih belum dirasakan oleh masyarakat Papua. Alih-alih menyelesaikan permasalahan, kebijakan-kebijakan tersebut justru memperburuk ketimpangan antara penduduk asli Papua dan pendatang. Percepatan pembangunan yang dicanangkan pemerintah seringkali tidak menyentuh akar permasalahan, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, pengakuan hak identitas, dan akses terhadap sumber daya pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi semata tidak cukup untuk mengatasi persoalan yang begitu dalam dan berlapis di Papua.

Selain itu, pendekatan nasionalisme politik Indonesia yang selama ini menjadi landasan integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tampaknya juga gagal mewujudkan janjinya. Nasionalisme politik yang selama masa perjuangan kemerdekaan berhasil merajut berbagai kepentingan masyarakat majemuk Indonesia kini kehilangan relevansinya ketika tidak ada lagi ancaman kolonialisme sebagai musuh bersama. Ketika semangat nasionalisme politik tersebut melemah, identitas kultural dan etnis Papua menjadi semakin kuat, menyebabkan perasaan keterasingan dari narasi besar sejarah Indonesia yang terkesan Jawasentris. Kegagalan dalam mengakomodasi sejarah politik dan budaya Papua ini memperburuk ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat, memperkuat sentimen marginalisasi, dan pada akhirnya melahirkan tuntutan akan pengakuan lebih besar terhadap hak-hak kultural dan politik mereka.

Marginalisasi ini semakin diperparah oleh tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan, seperti yang tercermin dalam berbagai kasus kekerasan di Papua, termasuk kasus Wasior (2001), Wamena (2003), dan Abepura (2001). Meski pelanggaran hak asasi manusia ini sering kali melibatkan aparat negara, penyelesaiannya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kasus-kasus kekerasan ini tidak hanya menambah luka mendalam bagi masyarakat Papua, tetapi juga memperkuat persepsi bahwa negara lebih memilih pendekatan kekerasan ketimbang dialog untuk menyelesaikan konflik. Situasi ini menambah kompleksitas dalam upaya meredakan ketegangan dan memperkuat kesenjangan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat, menegaskan bahwa tanpa perhatian serius pada aspek-aspek non-ekonomi, pembangunan yang berkelanjutan di Papua sulit untuk tercapai.

### C. *Smart Power* Solusi Penyelesaian Konflik

#### a) Pendekatan dialog dan negosiasi

Pendekatan *Smart Power* dalam penyelesaian konflik Papua, khususnya melalui dialog dan negosiasi, merupakan solusi yang strategis dalam menghadapi kompleksitas dinamika politik dan sosial di wilayah tersebut. Dialog sebagai elemen kunci dalam pendekatan ini memungkinkan semua pihak untuk mendefinisikan kembali tujuan dan kepentingan mereka secara konstruktif, sehingga mampu memfasilitasi penyelesaian konflik secara lebih komprehensif. Seperti yang diungkapkan oleh Morton Deutsch dan Peter T. Coleman dalam *Conflict Resolution Handbook* (2000), penyelesaian konflik yang efektif harus didasarkan pada prinsip timbal balik, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dalam konteks Papua, dialog yang mengedepankan nilai-nilai tersebut dapat membantu menciptakan landasan yang lebih solid untuk rekonsiliasi, di mana konflik dipahami sebagai masalah bersama yang harus diatasi tanpa kekerasan.

Indonesia memiliki modal politik yang penting dalam mendukung pendekatan dialog sebagai solusi bagi konflik Papua. Sebagai negara dengan demokrasi yang semakin matang, pemerintah Indonesia memiliki legitimasi dan motivasi politik yang kuat untuk menggunakan dialog sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa. Selain itu, pengalaman historis dalam menyelesaikan konflik di Aceh, Ambon, dan Poso melalui dialog damai menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya efektif, tetapi juga telah teruji (Samparisa O. D. Koibur, 2021). Pertanyaan yang relevan adalah, jika pendekatan dialog berhasil di wilayah-wilayah tersebut, mengapa pendekatan yang sama tidak dapat diterapkan di Papua? Meskipun polarisasi internal dalam kelompok-kelompok di Papua cukup kompleks, hal ini seharusnya tidak menjadi penghalang untuk memulai dialog yang terbuka dan inklusif.

Salah satu langkah penting yang diambil adalah pertemuan dengan berbagai perwakilan dan tokoh masyarakat Papua guna mencari model dialog yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, misalnya, telah menggalakkan serangkaian pertemuan intensif dengan tujuan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Inisiatif ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya pendekatan inklusif dalam menciptakan ruang dialog yang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok di Papua (Bonasir, 2021).

Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga berperan aktif dalam mendorong pemerintah untuk memprioritaskan dialog damai sebagai strategi utama dalam mengakhiri siklus kekerasan di Papua. Komnas HAM berpendapat bahwa dialog terbuka adalah kunci untuk mengungkap berbagai persoalan mendasar yang dialami masyarakat Papua, termasuk diskriminasi dan ketidakadilan (Yahya & Erdianto, 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk menggali akar masalah yang telah lama menjadi sumber ketegangan, serta menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk mencapai rekonsiliasi. Dengan mengangkat isu-isu hak asasi manusia dalam proses dialog, diharapkan penyelesaian konflik dapat lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Namun, terdapat sejumlah kritik terhadap implementasi dialog oleh pemerintah. Salah satu kritik utama adalah kurangnya keterlibatan masyarakat lokal Papua dalam proses dialog. Dialog yang sering kali dilakukan di tingkat elit cenderung mengabaikan perwakilan dari komunitas-komunitas lokal, sehingga solusi yang dihasilkan dianggap kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua secara luas. Hal ini memperlihatkan bahwa dialog yang bersifat inklusif dan representatif sangat diperlukan agar proses ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh konflik.

Kritik lain yang sering muncul adalah terkait dengan kurangnya transparansi dalam proses dialog. Masyarakat umum, khususnya di Papua, merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang perkembangan dan hasil dari pertemuan-pertemuan dialog yang telah dilakukan. Minimnya transparansi ini menciptakan kesenjangan

informasi yang dapat memperburuk ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat Papua. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan dialog juga menjadi tantangan tersendiri. Upaya dialog yang tidak berkelanjutan dan terputus-putus kerap kali menghambat tercapainya solusi yang efektif dan berjangka panjang.

Selain itu, isu-isu mendasar seperti diskriminasi dan ketidakadilan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam proses dialog. Banyak pihak berpendapat bahwa pemerintah harus lebih serius dalam membahas dan menangani masalah-masalah struktural yang selama ini menjadi akar ketidakpuasan masyarakat Papua. Dalam kerangka pendekatan *Smart Power*, dialog dan negosiasi di Papua juga harus melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, serta pemimpin tradisional dan agama. Proses dialog yang inklusif ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang berkonflik, sekaligus menciptakan ruang bagi diskusi yang lebih mendalam mengenai solusi-solusi damai.

### **b) Pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi**

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah menempatkan pembangunan dan pemerataan ekonomi di Papua sebagai prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi ketertinggalan ekonomi dan infrastruktur yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan Papua. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Jokowi menunjukkan komitmen pribadi yang kuat melalui kunjungan langsung ke Papua sebanyak enam kali selama masa jabatannya. Pendekatan ini tidak hanya memperlihatkan keterlibatan langsung Presiden dalam melihat kondisi di lapangan, tetapi juga mencerminkan fokus yang lebih terarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.

Salah satu kebijakan yang menonjol adalah penurunan biaya bahan bakar di Papua, yang disesuaikan dengan harga di wilayah lain di Indonesia. Kebijakan ini memiliki dampak signifikan dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat Papua, khususnya di daerah terpencil yang sebelumnya mengalami disparitas harga yang tinggi. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan kereta api juga menjadi perhatian utama. Pembangunan ini bertujuan untuk membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil, yang selama ini sulit dijangkau, sehingga dapat meningkatkan arus barang dan jasa serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Proyek-proyek infrastruktur ini tidak hanya memperbaiki konektivitas, tetapi juga berpotensi meningkatkan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya pembangunan pasar baru sebagai bagian dari upaya memberdayakan masyarakat adat secara ekonomi. Pendekatan ini memperlihatkan keberpihakan pemerintah pada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional. Upaya ini sejalan dengan kebijakan kesejahteraan yang mengedepankan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, terutama bagi kelompok yang paling rentan.

Lebih lanjut, pemerintahan Jokowi juga meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) pada tahun 2022. RIPPP merupakan kerangka kerja jangka panjang yang dirancang untuk mempercepat pembangunan di Papua hingga tahun 2041, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Itsaini & Alexander, 2024). RIPPP mencakup berbagai strategi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menargetkan pembangunan di sektor-sektor kunci yang dapat mendorong kualitas hidup masyarakat Papua secara keseluruhan.

Selain RIPPP, pemerintah juga meluncurkan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) untuk memantau dan mengoordinasikan berbagai proyek pembangunan di wilayah tersebut. SIPPP bertujuan memastikan bahwa setiap inisiatif pembangunan berjalan sesuai rencana dan dapat memberikan dampak nyata bagi

masyarakat. Ini menjadi alat penting dalam mengukur keberhasilan proyek-proyek pembangunan dan menjaga akuntabilitas pemerintah dalam upayanya meningkatkan taraf hidup di Papua (Itsnaini & Alexander, 2024). Pendekatan ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menangani kompleksitas pembangunan di Papua secara terukur dan transparan.

Pemerintah juga membangun proyek besar seperti perbaikan jalan Trans Papua sebagai upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah yang sebelumnya terisolasi. Bahwa infrastruktur ini diharapkan tidak hanya membuka akses ke daerah-daerah terpencil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mempermudah arus barang dan jasa. Pembangunan infrastruktur ini juga diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di wilayah tersebut.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pembentukan tiga provinsi baru (Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan) dengan tujuan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat (Kemensetneg, 2022). Pemekaran ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah serta memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau dapat menerima layanan publik yang memadai, yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi di setiap provinsi baru, dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.

Inisiatif pembangunan berkelanjutan juga telah menjadi fokus dalam upaya pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan di Papua. Program seperti Low Carbon Development Initiative di Papua Barat dan Green Economic Growth for Papua menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tengah upaya pembangunan ekonomi (Kemensetneg, 2022). Pembangunan rendah karbon ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam, yang sangat penting mengingat Papua memiliki kekayaan biodiversitas yang luar biasa.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan Papua. Pemerintah berfokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi masyarakat adat. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, di mana masyarakat lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi (Bapperida Provinsi Papua, 2023). Pengembangan UMKM dan koperasi tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal di Papua.

Meskipun terdapat banyak rencana ambisius, seperti Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses implementasi sering kali terhambat oleh birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Akibatnya, masyarakat Papua belum merasakan manfaat yang signifikan dari berbagai program pembangunan yang telah dijanjikan. Ketidakefisienan dalam eksekusi proyek ini menjadi salah satu sumber kekecewaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah di wilayah tersebut.

Kritik lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Beberapa pihak berpendapat bahwa proyek-proyek yang dicanangkan oleh pemerintah cenderung bersifat top-down, tanpa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat setempat. Akibatnya, proyek-proyek tersebut sering kali tidak sesuai dengan kondisi lokal dan gagal memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua. Kurangnya pelibatan masyarakat lokal juga menimbulkan masalah dalam hal penerimaan dan dukungan terhadap program pembangunan, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas dan kelangsungan program tersebut.

Ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Papua juga menjadi sorotan utama dalam kritik terhadap upaya pembangunan pemerintah. Meskipun

ada upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, daerah pedesaan di Papua masih sering tertinggal dalam hal akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan yang semakin memperparah ketidakpuasan masyarakat di daerah terpencil, yang merasa diabaikan dalam agenda pembangunan nasional. Ketidakseimbangan ini menjadi salah satu faktor yang memperumit upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua secara menyeluruh.

Masalah lingkungan juga menjadi aspek penting yang sering diabaikan dalam pembangunan infrastruktur besar-besaran di Papua. Proyek seperti pembangunan jalan Trans Papua, meskipun berdampak positif pada konektivitas wilayah, sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kerusakan hutan dan ekosistem lokal akibat pembangunan infrastruktur menjadi perhatian serius, terutama mengingat Papua memiliki kekayaan biodiversitas yang luar biasa. Kritik ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, agar dampak pembangunan tidak merusak potensi alam yang menjadi salah satu aset terbesar Papua.

Selain itu, isu korupsi dan penyalahgunaan dana publik juga menjadi kendala serius dalam upaya pembangunan di Papua. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk mempercepat pembangunan, ada kekhawatiran bahwa dana tersebut tidak selalu digunakan secara efektif dan transparan. Kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan dana pembangunan sering kali menghambat kemajuan yang seharusnya dicapai, serta memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pembangunan menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Papua.

Keberlanjutan program pembangunan juga menjadi perhatian penting dalam kritik terhadap pendekatan pemerintah di Papua. Banyak program pembangunan yang, setelah selesai, tidak dilanjutkan dengan mekanisme pemeliharaan atau pendampingan yang memadai, sehingga manfaatnya tidak dapat dirasakan secara jangka panjang oleh masyarakat. Ketiadaan program yang berkelanjutan menunjukkan bahwa upaya pembangunan belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

### **c) Penguatan otonomi khusus**

Pemerintah Indonesia pasalnya telah mengupayakan penguatan otonomi khusus di Papua sebagai bagian dari strategi penyelesaian konflik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satunya seperti merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang saat ini digantikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Revisi ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dalam konteks ini, pemerintah berharap bahwa kebijakan otonomi khusus dapat menciptakan ruang lebih besar bagi masyarakat Papua untuk menentukan arah pembangunan di wilayahnya, sekaligus memastikan bahwa alokasi dana otonomi khusus digunakan secara tepat guna untuk kepentingan publik (Samparisna O. D. Koibur, 2021).

Namun, upaya ini tidak lepas dari kritik, terutama terkait proses revisi undang-undang yang dianggap kurang melibatkan partisipasi masyarakat Papua secara memadai. Ketidakpuasan muncul dari beberapa kalangan yang merasa bahwa revisi tersebut dilakukan tanpa konsultasi yang mendalam dengan masyarakat lokal, sehingga menimbulkan penolakan di beberapa kelompok. Partisipasi yang minim dalam proses pengambilan keputusan ini dianggap mengurangi legitimasi kebijakan otonomi khusus, yang seharusnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Oleh karena itu, keterlibatan yang lebih inklusif dalam perumusan kebijakan dianggap penting untuk memperkuat

efektivitas implementasi otonomi khusus.

Pemerintah juga telah berupaya memperbaiki pengelolaan dana otonomi khusus dengan meningkatkan pengawasan dan transparansi. Dana ini, yang dirancang untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, seharusnya digunakan secara efektif untuk memperbaiki sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, meskipun ada langkah untuk meningkatkan pengawasan, beberapa laporan menunjukkan bahwa dana otonomi khusus belum sepenuhnya digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Isu korupsi dan penyalahgunaan dana menjadi sorotan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di Papua masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Selain itu, pendekatan keamanan yang masih dominan dalam penanganan konflik di Papua juga menjadi kritik utama terhadap kebijakan pemerintah. Meski penguatan otonomi khusus dimaksudkan untuk memberi lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, kebijakan keamanan yang represif sering kali dianggap menghambat upaya dialog dan rekonsiliasi yang lebih inklusif. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan militer yang berlebihan justru memperburuk situasi di lapangan, memperkuat rasa ketidakpuasan, dan memperlemah upaya-upaya pembangunan serta dialog damai. Oleh karena itu, penting untuk mengimbangi kebijakan keamanan dengan pendekatan pembangunan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Implementasi kebijakan otonomi khusus juga masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam mencapai daerah-daerah terpencil di Papua. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, distribusi manfaat tersebut belum merata. Wilayah pedalaman Papua sering kali tertinggal dari segi akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, sehingga sebagian besar masyarakat di wilayah ini belum merasakan dampak nyata dari otonomi khusus. Kritik mengenai implementasi yang lambat dan tidak merata ini menunjukkan bahwa penguatan otonomi khusus harus disertai dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap kebijakan mencapai seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil.

#### **d) Pendekatan keamanan yang humanis**

Pemerintah Indonesia telah mencoba menerapkan pendekatan keamanan yang lebih humanis di Papua. Salah satu langkah yang diambil adalah pendekatan berbasis teritorial yang menekankan penyadaran masyarakat Papua untuk merasa sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendekatan ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan, sekaligus memastikan bahwa pelanggaran hukum, khususnya yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM), ditindak tegas sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak sipil, dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menegaskan bahwa pendekatan humanis tetap menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah keamanan di Papua. Pemerintah berusaha untuk mengedepankan pendekatan yang mengutamakan dialog dan keterbukaan, dengan harapan dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan yang lebih konstruktif antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Pendekatan ini mencakup upaya dialog dengan para tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan pemuka agama setempat, yang bertujuan menciptakan suasana yang kondusif bagi penyelesaian konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat (Nugraheny & Prabowo, 2022).

Namun demikian, upaya pemerintah dalam menerapkan pendekatan keamanan yang humanis tidak lepas dari kritik. Meskipun ada langkah-langkah positif yang diambil, pendekatan keamanan yang lebih keras dan represif masih sering digunakan, terutama dalam

penanganan kelompok separatis seperti OPM. Beberapa pihak menyoroti bahwa penggunaan kekuatan militer yang berlebihan sering kali mengarah pada meningkatnya korban sipil dan memperburuk ketegangan di lapangan. Kritik ini menyoroti perlunya konsistensi dalam menerapkan pendekatan humanis dan pentingnya mengurangi penggunaan kekerasan dalam operasi keamanan, agar tujuan jangka panjang untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di Papua dapat tercapai.

Di sisi lain, tantangan dalam implementasi pendekatan humanis juga terletak pada kompleksitas situasi di Papua, di mana berbagai faktor seperti etnisitas, identitas, dan marginalisasi ekonomi turut memperumit dinamika konflik. Oleh karena itu, pendekatan keamanan yang lebih manusiawi harus disertai dengan upaya yang lebih holistik, termasuk pembangunan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, serta dialog berkelanjutan dengan seluruh lapisan masyarakat Papua. Pemerintah perlu memastikan bahwa upaya keamanan yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengatasi akar permasalahan sosial dan politik yang menjadi penyebab konflik berkepanjangan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Ketimpangan ekonomi dan marginalisasi sosial menjadi akar utama konflik berkepanjangan di Papua. Kesenjangan ini memperkuat perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat Papua, menciptakan lingkungan yang rawan konflik, dan memperdalam ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selain itu, kekerasan bersenjata yang terus terjadi telah memperburuk situasi kemanusiaan dan memicu siklus ketidakstabilan yang semakin kompleks, membuat penyelesaian konflik semakin sulit. Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan *Smart Power* yang menggabungkan kekuatan keras (*Hard Power*) dan lunak (*Soft Power*) menjadi kunci dalam upaya penyelesaian konflik. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog dan negosiasi sebagai sarana untuk meredakan ketegangan serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat Papua. Di sisi lain, kekuatan keras tetap dipergunakan untuk menjaga stabilitas dan menegakkan hukum, terutama dalam menghadapi kelompok bersenjata. Namun, penggunaan kekuatan harus tetap diimbangi dengan pendekatan yang humanis untuk mencegah korban di kalangan sipil. Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif juga diidentifikasi sebagai elemen penting dalam strategi penyelesaian konflik di Papua. Upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi melalui investasi infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan akses layanan publik yang merata dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Di samping itu, penguatan otonomi khusus harus dioptimalkan untuk memberi lebih banyak kewenangan kepada masyarakat Papua dalam mengelola sumber daya dan kebijakan daerah, guna memperkuat rasa memiliki dan partisipasi dalam proses pembangunan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada keluarga besar atas dukungan moral selama proses penelitian ini, serta kepada dosen dan mentor yang memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang sangat membangun. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini. Sebagai penghargaan kepada Papua dan masyarakatnya, penulis ingin menyampaikan ungkapan rasa hormat melalui sebuah puisi sederhana:

"Putih kulitku, kuning kulitku, hitam kulitku, Aku Papua. Lurus rambutku, kriting rambutku, Aku Papua, Aku Indonesia."

Puisi ini merupakan refleksi dari keberagaman dan keindahan yang dimiliki oleh Papua sebagai bagian integral dari Indonesia. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat berkontribusi, walaupun kecil, dalam upaya mencapai perdamaian dan kesetaraan di tanah Papua. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan solusi yang lebih baik bagi masa depan Papua dan Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023, July 17). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Badan Pusat Statistik. Retrieved September 16, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Bapperida Provinsi Papua. (2023). PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF: UPAYA MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN. Bapperida Provinsi Papua. Retrieved September 16, 2024, from <https://bappeda.papua.go.id/berita/pembangunan-ekonomi-inklusif-upaya-menciptakan-pembangunan-ekonomi-yang-berkualitas-dan-berkeadilan>
- BBC. (2023). Pilot Susi Air asal Selandia Baru disandera TPNPB-OPM: 'Pilot aman, disandera di tempat terpencil'. BBC News. Retrieved September 16, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz41e04xyrjo>
- Bonasir, R. (2021, May 31). Banyak sandungan menuju ruang dialog Papua, siapa wakilnya dan apa agendanya?: 'Jelas tentang hak-hak bangsa Papua untuk merdeka'. BBC. Retrieved September 16, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57255902>
- Cahya, M., Santiago, F., & Sara, R. (2023). The Armed Conflict in Papua Regarding the Sovereignty of Republic of Indonesia. MIC. <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2022.2327330>
- Chong, A. (2015). Smart Power and Military Force: An Introduction. *Journal of Strategic Studies*, 38(3), 233–244. <https://doi.org/10.1080/01402390.2014.1002915>
- Gallarotti, Giulio M. (2011) Soft Power: What it is, Why it's Important, and the Conditions for its Effective Use. *Journal of Political Power* 4/1, 33–4. <http://dx.doi.org/10.1080/2158379X.2011.557886>
- Hidayatulloh, H., Erdős, É., & Szabó, M. (2022). the Intricate Justice of Poverty: a Case of the Land of Gold in Indonesian Papua. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 557–584. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.58030>
- Itsnaini, F. M., & Alexander, H. B. (2024). Percepat Pembangunan di Papua, RIPP dan SIPP Resmi Meluncur. Kompas. Retrieved 9 16, 2024, from <https://lestari.kompas.com/read/2024/06/08/055552086/percepat-pembangunan-di-papua-rippp-dan-sipp-resmi-meluncur>
- Kartika, V. R., & Hamid, S. (2020). Developing Papua As A Way Out To Overcome The Armed Violence Group (Kelompok Kekerasan Bersenjata) in Papua. *Management Technology and Security International Journal*, 1(2), 180–188. <https://doi.org/10.47490/mtsij.v1.i2.180188>
- Moleong, LJ (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morton Deutsch and Peter T. Coleman. (2000). Conflict Resolution Handbook: Theory and Practice, Hunger and Wheelen
- Nye, Joseph S. Jr. (2009). Get Smart: Combining Hard and Soft Power, *Foreign Affairs*. 160–3, <http://www.foreignaffairs.com/articles/65163/joseph-s-nye-jr/get-smart>
- PT Freeport Indonesia. (2018). Implementing CSR, Freeport Focuses On Four Sectors. PFTI. Retrieved 9 16, 2024, from <https://ptfi.co.id/en/news/detail/implementing-csr-freeport-focuses-on-four-sectors>
- Samparisna O. D. Koibur. (2021). Papua Conflict Reconciliation Model and Strategies. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 8(4), 293–303. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v8i4.166>
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Yahya, A. N., & Erdianto, K. (2021). Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua. Kompas. Retrieved 9 16, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/06/17371651/komnas-ham-dialog-damai-sebagai-strategi-mengakhiri-siklus-kekerasan-di>